

**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2022**



***Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Melalui Pembangunan Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2022**

KATA PENGANTAR

Penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini disusun berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan I Tahun 2022, berpedoman rancangan RPKD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dan yang paling penting dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan Tahun 2022 ini adalah berpedoman pada perekonomian dan keuangan negara.

Seperti kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi, selain telah mempengaruhi tatanan perekonomian dan keuangan negara, juga telah mempengaruhi sasaran ekonomi yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Covid-19 turut menyebabkan sasaran ekonomi terkoreksi dan berpengaruh pada pencapaian target akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 maupun pencapaian target awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Akibat dampak pandemi Covid-19 ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan realokasi dan *refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19, dan melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh. Sehingga berdampak pada berkurangnya agenda-agenda pembangunan untuk tahun 2021 dan untuk tahun akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi perekonomian dan pembangunan pada sektor pertanian. Rencana-rencana pembangunan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi terhambat akibat Pandemi Covid-19.

Dampak dari pandemi Covid-19 pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi instansi pemerintah untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan negara.

Melihat situasi perekonomian dan keuangan negara akibat pandemi Covid-19, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melakukan penyesuaian anggaran dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2022 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpilih yang dituangkan dalam

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Meskipun dengan keterbatasan anggaran akibat Covid-19, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura akan berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura tetap berjalan.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.	17
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	18
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
BAB V PENUTUP	
5 .1 Penutup	21
LAMPIRAN	
Lampiran	i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan,
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan; Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022,
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2022; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2020 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan APBD perubahan tahun 2022. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
18. Keputusan Bupati Nomor 1129/Kep-Bup/DTPH/2017 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

Sedangkan tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan

dilaksanakan Tahun 2022 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
4. Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan, dan
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Perubahan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. Perubahan Program dan Kegiatan
Pada bagian ini dikemukakan perubahan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2022.

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidch-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN****2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 Triwulan I**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan berjalan, dan situasi perekonomian dan keuangan negara yang sedang terjadi saat ini. Dimana, seperti telah diketahui bersama bahwa dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang saat ini masih berlangsung, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan *refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara menyeluruh untuk penanganan Covid-19 serta untuk pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Dampak dari pandemi Covid-19 pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Agenda-agenda pembangunan yang telah disusun untuk tahun 2022 dan untuk tahun akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 menjadi terhambat. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi perekonomian dan pembangunan pada sektor pertanian. Rencana-rencana pembangunan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi terhambat akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra OPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Daerah OPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Akhir Juni Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Akhir Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Juni Tahun 2022 (%)	
			K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			59,219,790,590		3.36%		7,419,312,610		1,991,289,037		1,991,289,037		26.84%		1,991,289,037		3.36%
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Dengan Perkantoran Dengan Lancar	100%	13,458,881,898	100%	11.76%	100%	1,757,062,978	25%	1,582,862,037	100%	1,582,862,037	100%	90.09%	100%	1,582,862,037	100%	11.76%
3.27.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Dengan Perkantoran Dengan Lancar	100%	2,048,783,511	100%	2.04%	100%	283,644,000	25%	41,800,000	100%	41,800,000	100%	14.74%	100%	41,800,000	100%	2.04%
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA	42 Dokumen	845,471,277	16.67%	2.25%	7 Dokumen	57,022,000	2 Dokumen	19,000,000	7 Dokumen	19,000,000	100%	33.32%	7 Dokumen	125,650,000	16.67%	2.25%
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Statistik Pertanian	30 Dokumen	1,203,312,234	16.67%	1.89%	5 Dokumen	226,622,000	1 Dokumen	22,800,000	1 Dokumen	22,800,000	100%	10.06%	12 Bulan	22,800,000	16.67%	1.89%
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	100%	680,696,137	100%	191.76%	100%	138,800,000	25%	1,305,311,257	100%	1,305,311,257	100%	940.43%	100%	1,305,311,257	100%	191.76%
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	94 Orang	79,144,568,339	100.0%	1.63%	94 Orang	138,800,000	94 Orang	1,291,597,257	94 Orang	1,291,597,257	100%	930.55%	1 Orang	1,291,597,257	100.0%	1.63%

3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium Administrasi Keuangan	18 Orang	680,696,137	100.0%	2.01%	18 Orang	138,800,000	18 Orang	13,714,000	18 Orang	13,714,000	100%	9.88%	1 Orang	13,714,000	100.0%	2.01%
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	141,288,050	100%	0.00%	100%	101,700,000	25%	0	100%	0	0%	0.00%	100%	0	100%	0.00%
3.27.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	1.566 Stel	653,614,494	16.67%	0.00%	261 Stel	101,700,000	0	0	0	0	0%	0.00%	261 Stel	0	16.67%	0.00%
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	72 bulan	5,273,789,966	16.67%	2.31%	12 Bulan	159,105,478	3 Bulan	122,009,259	12 Bulan	122,009,259	100%	76.68%	100%	122,009,259	16.67%	2.31%
3.27.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor	72 Bulan	33,585,360	16.67%	0.00%	12 Bulan	5,210,805	0	0	0	0	100%	0.00%	12 Bulan	0	16.67%	0.00%
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	90 Paket/Buku	696,069,519	16.67%	3.30%	15 Paket/Buku	68,977,798	5 Paket/Buku	22,981,663	15 Paket/Buku	22,981,663	100%	33.32%	15 Paket/Buku	22,981,663	16.67%	3.30%
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	4362 Kotak	281,016,426	11%	0.27%	727 Kotak	18,175,000	254 Kotak	750,000	564 Kotak	750,000	64%	4.13%	564 Kotak	750,000	11%	0.27%
3.27.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan (blangko atau formulir atau yang lainnya) dan penggandaan	216 Paket/Buku	391,887,387	16.7%	2.62%	36 Paket/Buku	60,741,875	12 Paket/Buku	10,250,000	36 Paket/Buku	10,250,000	100%	16.87%	36 Paket/Buku	10,250,000	16.7%	2.62%
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Bulan	38,589,237	16.7%	1.71%	12 Bulan	6,000,000	3 Bulan	660,000	3 Bulan	660,000	100%	11.00%	12 Bulan	660,000	16.7%	1.71%
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72 Bulan	3,832,642,037	16.7%	2.28%	12 Bulan	1,200,000,000	3 Bulan	87,367,596	3 Bulan	87,367,596	100%	7.28%	12 Bulan	87,367,596	16.7%	2.28%
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	2,200,859,976	17%	3.40%	12 Bulan	344,593,500	3 Bulan	74,914,221	12 Bulan	74,914,221	100%	21.74%	12 Bulan	74,914,221	17%	3.40%
3.27.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan Surat Menyurat	72 Bulan	19,544,995	17%	5.12%	12 Bulan	3,000,000	3 Bulan	1,000,000	3 Bulan	1,000,000	50%	33.33%	12 Bulan	1,000,000	17%	5.12%
3.27.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	72 Bulan	717,477,779	17%	3.40%	12 Bulan	112,993,500	3 Bulan	24,414,221	3 Bulan	24,414,221	50%	21.61%	12 Bulan	24,414,221	17%	3.40%
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya Kebutuhan Pelayanan Kantor	72 Bulan	1,463,837,201	17%	3.38%	12 Bulan	228,600,000	3 Bulan	49,500,000	3 Bulan	49,500,000	50%	21.65%	12 Bulan	49,500,000	17%	3.38%
3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804 Unit	3,113,464,258	17%	1.25%	134 Unit	729,220,000	6 Unit	38,827,300	134 Unit	38,827,300	96%	5.32%	134 Unit	38,827,300	17%	1.25%

3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	6 Unit	248,853,141	17%	5.38%	1 Unit	38,596,000	0	13,384,800	1 Unit	13,384,800	100%	34.68%	1 Unit	13,384,800	17%	5.38%
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Terpelihara	702 Unit	2,796,691,504	17%	0.80%	117 Unit	536,600,000	0	22,442,500	116 Unit	22,442,500	99%	4.18%	116 Unit	22,442,500	17%	0.80%
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC Milik Kantor yang Terpelihara	90 Unit	67,919,614	17%	4.42%	8 Unit	38,968,000	3 Unit	3,000,000	3 Unit	3,000,000	100%	7.70%	8 Unit	3,000,000	17%	4.42%
		Jumlah Laptop/PC Milik Kantor yang terpelihara			17%		7 Unit		3 Unit		3 Unit		100%		7 Unit		17%	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Terpelihara	6 Unit	192,934,184	17%	0.00%	1 Unit	115,056,000	0	0	0	0	100%	0%	1 Unit	0	17%	0.00%
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		12%	5,286,410,753	0	1.33%	2%	537,377,428	0	70,172,000	0	70,172,000	0	13.06%	0	70,172,000	0	1.33%
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		12%	5,124,920,303	0	0.35%	2%	355,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	0	5.07%	0	18,000,000	0	0.35%
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sosialisasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	18 Kali	5,124,920,303	16.67%	0.35%	3 Kali	355,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000		5.07%	0	18,000,000	16.67%	0.35%
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		12%	161,490,450	0	32.31%	2%	182,377,428	0	52,172,000	2%	52,172,000	100%	28.61%	2%	52,172,000	0	32.31%
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya bibit hortikultura hasil kultur jaringan berlabel	12.000 Benih Pisang	161,490,450	16.67%	32.31%	2000 Benih Pisang	182,377,428	500 Benih Pisang	52,172,000	500 Benih Pisang	52,172,000	100%	28.61%	2000 Benih Pisang	52,172,000	16.67%	32.31%
		Tersedianya Benih Padi Unggul bermutu untuk Penangkaran	150 Ha		16.67%		25 Ha		0		0		100%		25 Ha		16.67%	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		65.09	9,593,635,928	0	0.13%	62.55	3,594,858,451	0	12,000,000	62.55	12,000,000	100%	0.33%	62.55	12,000,000	0	0.13%
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		12%	132,244,600	0	4.54%	2%	132,244,600	0	6,000,000	2%	6,000,000	100%	4.54%	2%	6,000,000	0	4.54%

3.27.03.2.01.0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	Jumlah Sosialisasi/Pembelajaran Penerapan Informasi dan Teknologi Peran Serta Kelompok Tani Dalam Perluasan Areal Pertanian	12 Kali	102,244,600	17%	5.87%	2 Kali	102,244,600	0	6,000,000	2 Kali	6,000,000	100%	6%	2 Kali	6,000,000	17%	5.87%
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		12%	9,461,391,328	0	0.06%	2%	3,462,613,851	0	6,000,000	2%	6,000,000	100%	0.17%	2%	6,000,000	0	0.06%
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Sumber Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun	18 Unit	3,416,613,535	11.11%	0.00%	3 Unit	855,000,000	0	0	2 Unit	0	67%	0%	2 Unit	0	11.11%	0.00%
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun	10 KM	2,628,164,258	30%	0.00%	3 KM	700,000,000	0	0	3 KM	0	100%	0%	3 KM	0	30%	0.00%
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP beserta Sarana Pendukungnya yang dibangun/diperbaiki	5 BPP	2,628,164,258	160%	0.00%	8 BPP	1,389,438,851	0	0	8 BPP	0	100%	0%	8 BPP	0	160%	0.00%
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Air Mendukung Pertanian	18 Kali	788,449,277	16.67%	0.76%	3 Kali	518,175,000	3 Kali	6,000,000	3 Kali	6,000,000	100%	1.16%	3 Kali	6,000,000	16.67%	0.76%
		Desain Pengembangan Jaringan Irigasi	6 Dok.		16.67%		1 Dok.		1 Dok.		1 Dok.		100%		1 Dok.		16.67%	
		Pendampingan Kegiatan DAK Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022	6 Kegiatan		16.67%		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100%		1 Kegiatan		16.67%	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100%	3,737,636,832	0%	0.32%	100%	69,553,500	0%	12,000,000	100%	12,000,000		17.25%	100%	12,000,000	0%	0.32%
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		100%	3,737,636,832	0%	0.32%	100%	69,553,500	0%	12,000,000	100%	12,000,000		17.25%	100%	12,000,000	0%	0.32%
3.27.05.2.01.0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Sarana Brigade Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura	5.100 Liter/Kg	2,402,531,406	0.47%	0.25%	100 Liter/Kg	25,200,000	0	6,000,000	24%	6,000,000	24%	23.81%	24%	6,000,000	0.47%	0.25%
3.27.05.2.01.0	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Lahan Sawah yang Mendapatkan Subsidi AUTP	18 Kali	1,335,105,426	16.67%	0.45%	3 Kali	44,353,500	0	6,000,000	100%	6,000,000	100%	13.53%	100%	6,000,000	16.67%	0.45%
3.27.07	Program Penyuluhan		150%	27,143,225,180	0%	1.16%	25%	1,460,460,253	0%	314,255,000	100%	314,255,000	100%	21.52%	100%	314,255,000	0%	1.16%

Pertanian																		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%	27,143,225,180	0%	1.16%	100%	1,460,460,253	0%	314,255,000	100%	314,255,000	100%	21.52%	100%	314,255,000	0%	1.16%
3.27.07.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	13 Kecamatan	5,246,075,375	100	0.23%	13 Kecamatan	120,265,000	0	12,000,000	13 Kecamatan	12,000,000	100%	9.98%	13 Kecamatan	12,000,000	100	0.23%
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan Honor PPL-THL, UKB, ATK, dan Perlengkapan BPP	72 Bulan	21,897,149,805	16.67%	1.38%	12 Bulan	1,340,195,253	3 Bulan	302,255,000	3 Bulan	302,255,000	100%	22.55%	12 Bulan	302,255,000	16.67%	1.38%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

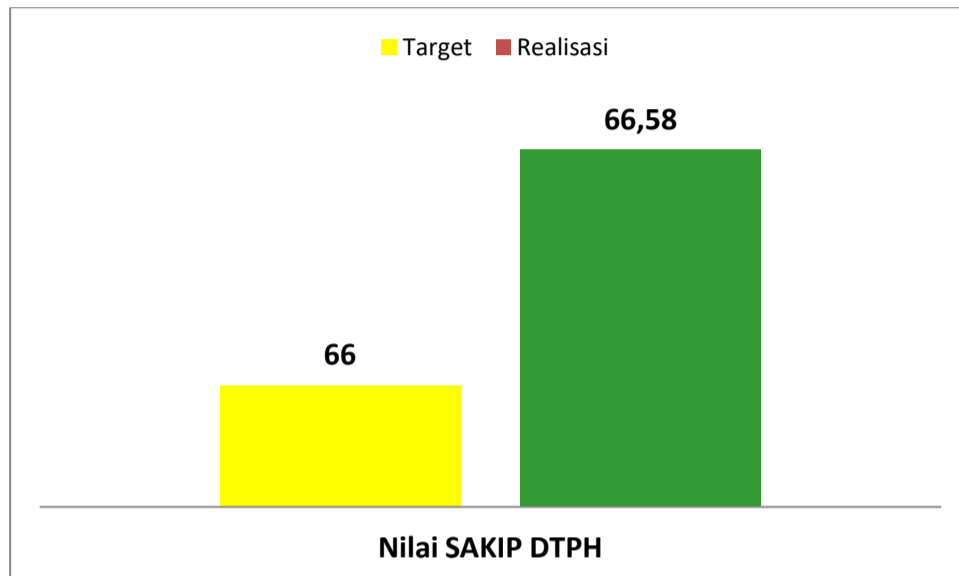
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pilihan bidang pertanian. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 2.3 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	66	66,58	100,88
2.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) - Padi - Jagung - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar	43.869 2.572 12 4.740 324	42.444 1.354 56 4.697 117	96,75 52,64 466,67 99,09 36,11
			Jumlah Produksi Hortikultura (Ton) - Duku - Durian - Jeruk - Pisang - Nenas - Jahe	680 1.602 1.746 27.378 113 157	1.984 1.506 2.264 22.198 197 186	291,76 94,01 129,67 81,08 174,34 118,47

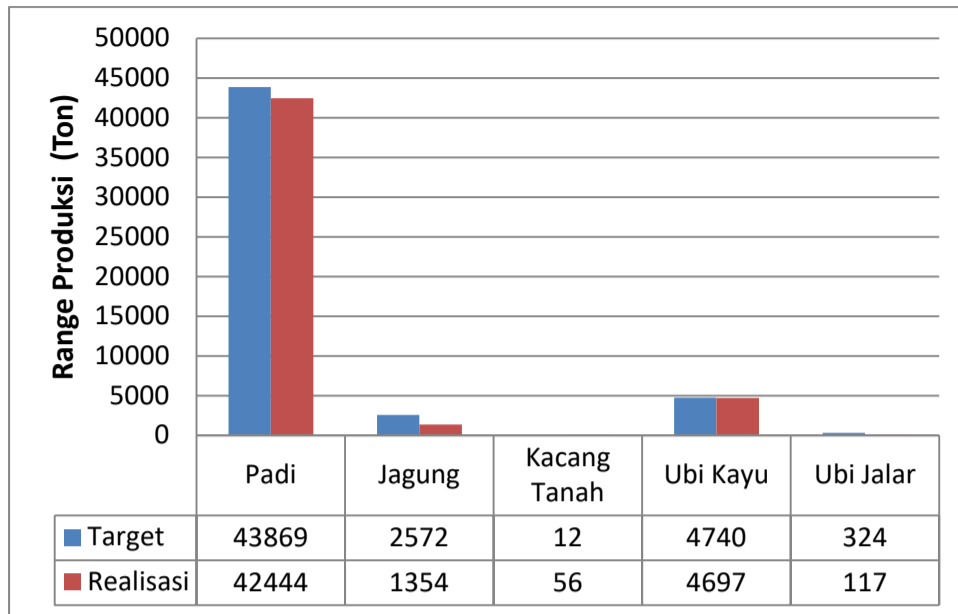
Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikategorikan "SANGAT BAIK". Untuk indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, capaian indikator kinerja yang dihasilkan melebihi target (100,88).



Gambar 2.1

Grafik Perbandingan Target Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 dengan Realisasi Pencapaiannya.

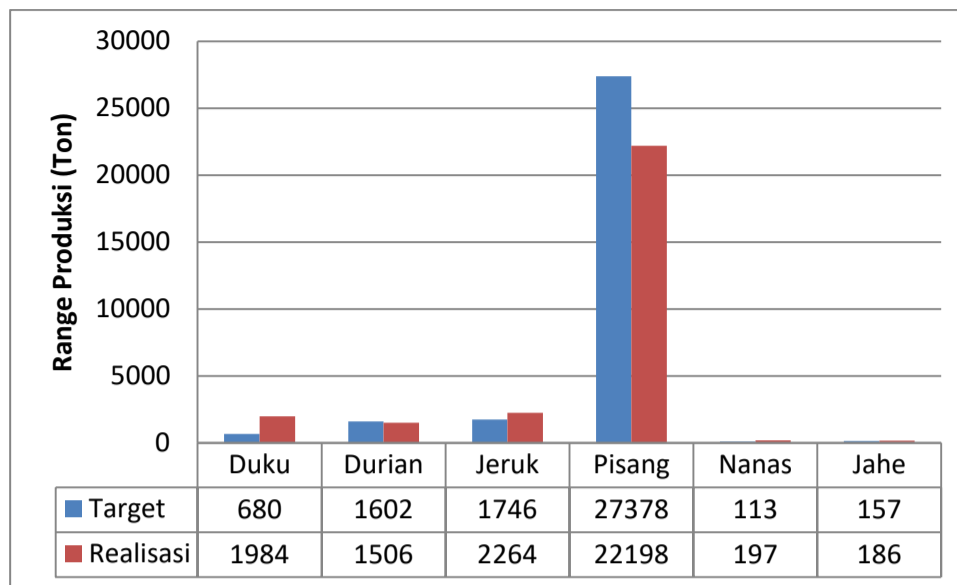
Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, secara keseluruhan, capaian kinerja yang dihasilkan juga melebihi target (150,25 dengan Kategori SANGAT BAIK). Meskipun target produksi padi tahun 2021 tidak tercapai, akuntabilitas kinerja peningkatan produksi Padi masih dapat dikategorikan "BAIK". Sedangkan untuk indikator peningkatan produksi Jagung, akuntabilitas kinerjanya dikategorikan "KURANG". Untuk indikator peningkatan produksi Ubi Kayu, akuntabilitas kinerjanya dikategorikan "BAIK". Dan untuk indikator peningkatan produksi Ubi Jalar, akuntabilitas kinerjanya dikategorikan "KURANG".



Gambar 2.2

Grafik Perbandingan Target Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2021 dengan Realisasi Pencapaiannya.

Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi hortikultura, secara rata-rata, capaian kinerja yang dihasilkan juga melebihi target (148,22 dengan Kategori SANGAT BAIK). Jumlah produksi Duku, Jeruk, Nanas, dan Jahe pada tahun 2021 melebihi target produksi yang ingin dicapai, sehingga akuntabilitas kinerja peningkatan produksi keempat komoditi hortikultura ini dikategorikan "SANGAT BAIK". Sedangkan untuk indikator peningkatan produksi Durian dan Pisang, akuntabilitas kinerja nya dapat dikategorikan "BAIK".

**Gambar 2.3**

Grafik Perbandingan Target Peningkatan Produksi Hortikultura Tahun 2021 dengan Realisasi Pencapaiannya.

Dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap ketiga indikator kinerja utama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 dikategorikan “**SANGAT BAIK**”.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 dengan Tahun 2020

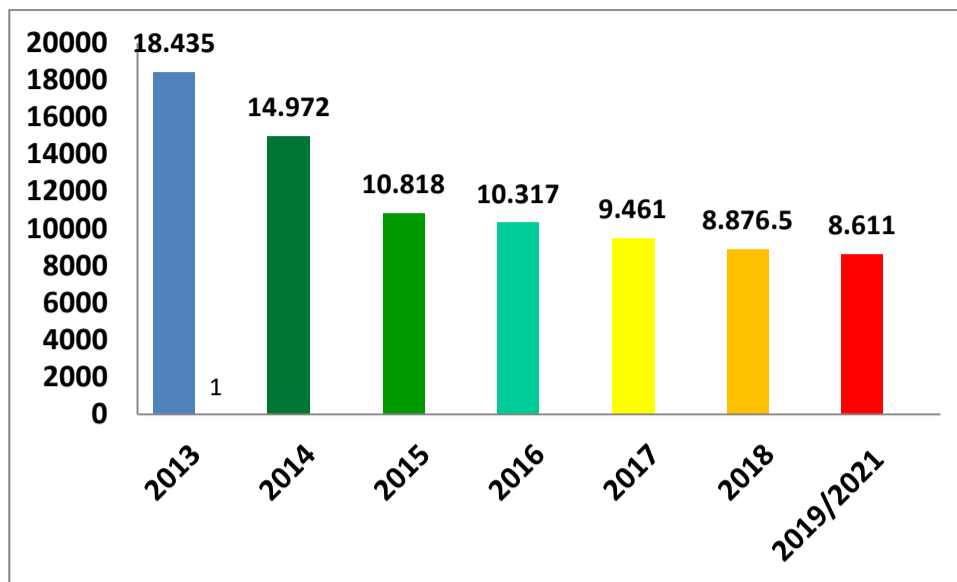
No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Meningkat/ Menurun	Tingkat Capaian (%)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63,07	66,58	2,61	104,08
2.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)				
	- Produksi Padi	43.013	42.444	-569	98.677
	- Produksi Jagung	2.522	1.354	-1.168	53.688
	- Produksi Kacang tanah	12	56	44	466.67
	- Produksi Ubi kayu	4.647	4.697	50	101.08
	- Produksi Ubi jalar	318	117	-201	36.792
3.	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)				
	- Produksi Duku	667	1.984	1317	297,45
	- Produksi Durian	1.572	1.506	-66	95,80
	- Produksi Jeruk	1.712	2.264	552	132,24
	- Produksi Pisang	26.844	22.198	-4.646	82,69
	- Produksi Nenas	110	197	87	179,09
	- Produksi Jahe	154	186	32	120,78

Meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi selama Tahun 2021, pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berjalan, karena selain didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi melalui Dana DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Pertanian serta Dana Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2021, Pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, seperti : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura ~ Jeruk 10 Ha, Bantuan Benih Padi Inbrida ~ 1.500 Ha, Bantuan Paket Kacang Tanah ~ 100 Ha, Bantuan Paket Padi Lahan Kering ~ 327,5 Ha, Bantuan Benih Jagung ~ 500 Ha, Bantuan Paket Padi Biofortifikasi ~ 462 Ha, Bantuan Benih Padi Sawah PEN ~ 1.425 Ha, Bantuan Paket Padi Rawa ~ 500 Ha, Bantuan Paket Kedelai PEN ~ 200 Ha, Bantuan Benih Padi Sawah ~ 3.000 Ha, Pembangunan Jalan Pertanian ~ 7 Unit, Pembangunan Embung Pertanian ~ 1 Unit, Rehab Jaringan Irigasi Tersier ~ 29 Unit, Kegiatan Registrasi Kebun/Lahan Komoditas Hortikultura ~ 3 Kelompok Tani, Bantuan Sarana Pascapanen ~ Power Thresher 4 Unit, Bantuan Sarana Pascapanen ~ UPH 1 Unit, Bantuan Sarana Pascapanen ~ CHK 2 Unit, Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ~ 2 Unit, Pembangunan Jalan Pertanian ~ 3 KM, Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP ~ 8 Unit, Renovasi BPP Kecamatan Tungkal Ilir ~ 1 Unit, Pengembangan Kawasan Jahe ~ 10 Ha, Pengembangan Kawasan Pisang ~ 1,5 Ha, dan Kegiatan Penyuluhan Pertanian.

Tabel. 3.4 Luas Lahan Baku Lahan Sawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 s/d 2021.

No.	Kecamatan	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/2021
1	Tungkal Ilir	805	805	550	417	467	344	344
2	Bram Itam	2.950	1.450	760	815	817	534	534
3	Seberang Kota	737	737	181	155	110	206	142
4	Betara	850	350	229	277	392	415	373
5	Kuala Betara	1.095	721	721	665	405	183	187
6	Pengabuan	3.676	3.238	3.118	2.853	2.426	2.604	2.426
7	Senyerang	4.487	3.893	3.638	3.764	3.216	3.179	3.179
8	Tungkal Ulu	230	230	63	60	81	82	82
9	Batang Asam	1.055	998	998	951	1.069	1.007	1.067
10	Tebing Tinggi	2.500	2.500	500	300	318	200	152
11	Renah Mendaluh	50	50	60	60	160	125	125
Total		18.435	14.972	10.818	10.317	9.461	8.876,5	8.611



Gambar 2.4

Grafik luas baku lahan sawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 s/d 2021.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung-jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

Tabel 3.5 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target & Realisasi Fisik			Daya Serap Keuangan	
			Target	Realisasi	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5		6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	2.172.471.565	100	100	100	1.927.260.866	89
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	186.644.000	12 Bulan	12 Bulan	100	186.632.000	99,99
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.022.000	7 Dok.	7 Dok.	100	57.010.000	99,98
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Belanja Barang dan Jasa	129.622.000	5 Dok.	5 Dok.	100	129.622.000	99,99
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	11.188.236.371	1 Laporan	1 Laporan	100	10.398.958.883	92,95
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.049.436.371	94 Orang	94 Orang	100	10.270.558.883	92,95

4	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	6.000.000	18 Orang	18 Orang	100	6.000.000	100
C	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		12 Bulan	12 Bulan	100		94,30
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.700.000	261 Stel	261 Stel	100	95.905.600	94,30
D	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.013.316.065	12 Bulan	12 Bulan	100	643.416.808	63,50
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.201.186	12 Bulan	12 Bulan	100	5.201.186	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.358.004	15 Paket/Buku	15 Paket/Buku	100	101.754.116	94,78
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.175.000	12 Bulan	12 Bulan	100	4.031.000	22,18
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.741.875	36 Paket/Buku	36 Paket/Buku	100	56.373.000	92,81
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100	3.370.000	56,17
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	815.840.000	12 Bulan	12 Bulan	100	472.687.506	53,94
E	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	40.000.000	6 Unit	6 Unit	100	39.930.000	99,83
12	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	40.000.000	6 Unit	6 Unit	100	39.930.000	99,83
F	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	344.593.500	12 Bulan	12 Bulan	100	325.232.588	94,38
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100	3.000.000	100,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.993.500	12 Bulan	12 Bulan	100	93.632.588	82,87
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.600.000	12 Bulan	12 Bulan	100	228.600.000	100
G	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	695.570.000	134 Unit	134 Unit	100	629.143.870	90,45
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.596.000	1 Unit	1 Unit	100	37.720.768	97,73
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.950.000	116 Unit	116 Unit	100	448.459.102	89,17
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.968.000	16 Unit	16 Unit	100	28.908.000	74,18
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.056.000	1 Unit	1 Unit	100	115.056.000	100
II	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	591.837.547	100	100	100	566.632.738	95,74
H	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	409.460.119	2%	2%	100	385.075.310	94,04
20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	355.000.000	10%	10%	100	330.666.560	93,15
21	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	54.460.119	3 Kali	3 Kali	100	54.408.750	99,91
I	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	182.377.428	2%	2%	100	181.557.428	99,55
22	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	182.377.428	2.000 Bibit	2.000 Bibit	100	181.557.428	99,55
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.395.858.451	62,55	59,94	95,83	2.631.728.300	77,50

<i>J</i>	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	102.244.600	21	21	100	92.621.400	90,59
23	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	102.244.600	46 Ha	46 Ha	100	92.621.400	90,59
<i>K</i>	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	3.462.613.851	41,55	41,55	91,67	2.718.681.900	78,52
24	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	855.000.000	3 Unit	2 Unit	66,67	200.000.000	23,39
25	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	700.000.000	3 KM	3 KM	100	700.000.000	100,00
26	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.390.438.851	9 Unit	9 Unit	100	1.364.468.400	98,13
27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	348.175.000	1 Dok	1 Dok	100	274.638.500	78,88
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69.553.500	100%	100%	100	69.553.500	100
<i>L</i>	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	69.553.500	100%	100%	100	69.553.500	100
28	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	25.200.000	24 Kg	24 Kg	100	25.200.000	100
29	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	44.353.500	2 Kali	2 Kali	100	44.353.500	100
V	Program Penyuluh Pertanian	1.354.460.253	25%	25%	100	1.345.047.103	99,31
<i>M</i>	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	120.265.000	100%	100%	100	118.941.850	98,90
30	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	120.265.000	2 Poktan	2 Poktan	100	118.941.850	98,90
31	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.234.195.253	12 Bulan	12 Bulan	100	1.226.105.253	99,34
Total		19.150.769.687			99,17	17.111.761.390	89,35

Dari tabel di atas, Realisasi keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 hanya mencapai 89,35%. Pencapaian realisasi keuangan sebesar 89,35% ini disebabkan karena :

1. Adanya refocusing anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang pada awalnya pagu anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini dianggarkan sebesar Rp. 11.188.236.371. Dimana, refocusing anggaran pada Kegiatan ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan perubahan mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 hingga mengalami 3 (tiga) kali Mendahului Perubahan. Realisasi anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebesar 10.398.958.883 atau sebesar (92,95%). Sisa anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah sebesar Rp. 778.877.488.

2. Adanya penghematan anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dimana, anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini direncanakan sebesar Rp. 815.840.000. Dan realisasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar 472.687.506 atau sebesar (57,94%). Salah satu penyebab efisiensi/penghematan anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini karena pada Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih berlangsung yang menyebabkan semua aktivitas menjadi terbatas (adanya pembatasan bahkan pelarangan masuk ke suatu wilayah/daerah).
3. Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 285.000.000 per unit nya. Setelah diverifikasi, pekerjaan Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ini hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) unit saja dan anggaran yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ini hanya sebesar Rp. 100.000.000 per unit nya. Sehingga, dari total pagu anggaran Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebesar Rp. 855.000.000, realisasi keuangannya hanya sebesar Rp. 200.000.000 (23,39%). Sisa anggaran pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ini adalah sebesar Rp. 655.000.000.
4. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan rutin/wajib maupun pada program dan kegiatan urusan pilihan.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta disesuaikan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2022

Kebijakan Pusat (Kementerian Pertanian)	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Bidang Pertanian Kab. Tanjung Jabung Barat	Program/ Kegiatan dalam Renja 2022
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian	Meningkatkan Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Lainnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian	Meningkatkan Hasil dan Mutu Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura		Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 mengacu menggunakan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan

teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sasaran : Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
2. Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3.3 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016 - 2021, yakni : *Menuju Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis.* dan Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Misi ke-4, yaitu : "*Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*", maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura diantaranya adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan :

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Komoditas, Teknologi, dan Spesifikasi Lokasi

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/kota

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan :

a. Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan

b. Pembangunan Prasarana Pertanian

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Kegiatan :
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4. Program Penyuluhan Pertanian
- Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022 merupakan rancangan awal dari rancangan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Ada beberapa kegiatan prioritas yang direncanakan akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2022, seperti Pengembangan Balai Benih Induk (BBI) Teluk Nilau, Pengembangan Kebun Pisang Percontohan, Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung, Pembangunan Jalan Pertanian, Pembangunan Sumber-sumber Air, Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian, dan Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pertanian.

Rencana Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pertanian ini cukup penting untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi maupun kinerja Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 ini.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2022. Tujuan penyusunan Renja Perubahan dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2022, mengacu pada perencanaan tahun pertama rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dan yang terpenting dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah kondisi perekonomian dan keuangan negara. Perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan, sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam target awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tabel A. Rumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Tahun 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN ANGGARAN		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang/Bertambah
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					38.408.700.000	28.563.064.645	(8.633.489.770)
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP OPD	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	66.00(B) KATEGORI	15.283.700.000	14.477.997.620	406.443.205
3.27.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	12 Dokumen	500.000.000	182.022.000	(225.000.000)
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000	57.022.000	-
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5 Laporan	350.000.000	125.000.000	(225.000.000)
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	12 Laporan	12.920.000.000	12.274.092.415	23.260.000
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	94 Orang	94 Orang	12.810.000.000	12.140.832.415	-
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	18 Orang	1 Dokumen	110.000.000	133.260.000	23.260.000

3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	100%	128.000.000	108.600.000	(19.400.000)
3.27.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	261 Stel	1 Paket	105.000.000	108.600.000	3.600.000
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Orang	-	23.000.000		
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	12 Laporan	851.600.000	843.705.205	(7.894.795)
3.27.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	1 Paket	5.400.000	5.210.805	(189.195)
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	15 Paket	112.000.000	137.000.000	25.000.000
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	1 Paket	50.000.000	18.175.000	(31.825.000)
3.27.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	36 Paket	63000000	63000000	-
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	5 Dokumen	6.200.000	6.000.000	(200.000)
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	12 Laporan	615.000.000	614.319.400	(680.600)
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat		6 Unit		30.000.000	530.000.000
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat		1 Unit		500.000.000	500.000.000
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat		5 Unit		30.000.000	30.000.000

3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	25 Laporan	353.100.000	354.000.000	900.000
3.27.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	1 Laporan	3.100.000	4.000.000	900.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	12 Laporan	115.000.000	115.000.000	-
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	12 Laporan	235.000.000	235.000.000	-
3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Baik	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Bulan	152 Unit	531.000.000	685.578.000	104.578.000
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Unit	1 Unit	40.000.000	90.000.000	50.000.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Unit	116 Unit	449.000.000	535.600.000	86.600.000
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Unit	30 Unit	11.000.000	29.990.000	18.990.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Unit	1 Unit	31.000.000	29.988.000	(1.012.000)
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	128,78	128,78	6.150.000.000	5.113.312.025	(1.036.687.975)
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	2%	2%	5.450.000.000	4.400.000.000	(1.050.000.000)

3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	75 Ton 317170 Batang/Anak-an 5 Ton 5 Ton 12 Ton 2 Dokumen 12 Bulan 150 T0n	1 Laporan	5.450.000.000	4.400.000.000	(1.050.000.000)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	2%	2%	700.000.000	713.312.025	13.312.025
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	1000 Bibit/Anakan	1 VUB	700.000.000	713.312.025	13.312.025
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan (%)	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	63,18	63,18	11.600.000.000	6.050.000.000	(5.550.000.000)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Indeks Pengembangan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peruntukan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	2%	2%	6.000.000.000	175.000.000	(5.825.000.000)
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	2 Kali 13 Kali	1 Dokumen	6.000.000.000	175.000.000	(5.825.000.000)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Indeks Pembangunan Prasarana	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	41,18	41,18	5.600.000.000	5.875.000.000	275.000.000

		Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peruntukan						
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	1000 Meter	9 Unit	650.000.000	775.000.000	125.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	8000 Meter	5 Unit	3.700.000.000	300.000.000	(3.400.000.000)
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit	-	500.000.000		(500.000.000)
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	1 BPP	5 Unit	600.000.000	2.400.000.000	1.800.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Kali	3 Unit	11.600.000.000	4.764.185.480	514,185,480
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Fasilitas Pengendalian Bencana Pertanian	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	100%	775.000.000	775.000.000	-
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	100%	775.000.000	775.000.000	-
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	11 Kecamatan 10 Kelompok Tani	1000 Ha	600.000.000	600.000.000	-
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	2 Kali	1.500 Ha	175.000.000	175.000.000	-

3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat			200.000.000		(200.000.000)
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat			200.000.000		(200.000.000)
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen		200.000.000		(200.000.000)
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab. Tanjung Jabung Barat	25%	25%	4.400.000.000	2.146.755.000	(2.253.245.000)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pertanian	DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	100%	4.400.000.000	2.146.755.000	(2.253.245.000)
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluh di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Tanjung Jabung Barat	- 2 Desa	1 Unit	400.000.000	646.755.000	246.755.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	13 Unit	4.000.000.000	1.500.000.000	(2.500.000.000)

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005

Tabel B. Rumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Tahun 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Renja 2022			Target Capaian DPA			DPA			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang/ Bertambah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	MP I	Setelah Perubahan	Berkurang/ Bertambah
							(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						38.408.700.000	28.563.064.645	(8.633.489.770)				20.745.587.800	20.745.587.800	28.563.064.645	7.939.949.720
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Lancar	Nilai AKIP OPD	100%	66.00(B) KATEGORI		15.283.700.000	14.477.997.620	406.443.205	100%	66.00(B) KATEGORI	13.891.906.083	13.891.906.083	14.477.997.620	805.564.412	
3.27.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Lancar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	12 Dokumen		500.000.000	182.022.000	(225.000.000)	100%	12 Dokumen	105.300.000	105.300.000	182.022.000	19.700.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Rancangan Renja Rancangan Renstra Ranwal Renja Ranwal Renstra Renja Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	7 Dokumen		150.000.000	57.022.000	-	13 Dokumen	7 Dokumen	68.550.000	68.550.000	57.022.000	-11.528.000	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Renja Triwulan I Evaluasi Renja Triwulan II Evaluasi Renja Triwulan III Evaluasi Renja Triwulan IV Evaluasi Renstra	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5 Dokumen		350.000.000	125.000.000	(225.000.000)	12 Bulan	5 Dokumen	105.300.000	105.300.000	125.000.000	19.700.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	Laporan keuangan tahunan OPD	100%	12 Laporan		12.920.000.000	12.274.092.415	23.260.000	100%	12 Laporan	12.250.832.315	12.250.832.315	12.274.092.415	23.260.100	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	94 Orang		12.810.000.000	12.140.832.415	-	12 Bulan	94 Orang	12.140.832.415	12.140.832.415	12.140.832.415	0	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang	18 Orang		110.000.000	133.260.000	23.260.000	12 Bulan	18 Orang	109.999.900	109.999.900	133.260.000	23.260.100	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	100%		128.000.000	108.600.000	(19.400.000)	100%	100%	0	0	0	0	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	261 Stel	1 Paket		105.000.000	108.600.000	3.600.000	261 Steel	1 Paket	101.600.000	101.600.000	108.600.000	7.000.000,0	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Kegiatan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Kali			23.000.000								0	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Cakupan layanan administrasi umum	100%	12 Laporan		851.600.000	843.705.205	(7.894.795)	100%	12 Laporan	766.002.768	766.002.768	843.705.205	54.604.312	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1 Paket		5.400.000	5.210.805	(189.195)	12 Bulan	1 Paket	5.201.186	5.201.186	5.210.805	9.619	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	15 Paket		112.000.000	137.000.000	25.000.000	12 Bulan	15 Paket	95.570.307	95.570.307	137.000.000	41.429.693	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan untuk Pameran Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	1 Paket		50.000.000	18.175.000	(31.825.000)	12 Bulan	1 Paket	5.010.000	5.010.000	18.175.000	13.165.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tercukupinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	12 Bulan	36 Paket		63.000.000	63.000.000	-	12 Bulan	36 Paket	39.901.875	39.901.875	63.000.000	-	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Bulan	5 Dokumen		6.200.000	6.000.000	(200.000)	12 Bulan	5 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keDalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Laporan		615.000.000	614.319.400	(680.600)	12 Bulan	12 Laporan	614.319.400	614.319.400	614.319.400	-	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan		6 Unit			30.000.000	530.000.000		6 Unit			530.000.000	530.000.000	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		1 Unit			500.000.000	500.000.000		1 Unit			500.000.000	500.000.000	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor		5 Unit			30.000.000	30.000.000		5 Unit			30.000.000	30.000.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25 Laporan		353.100.000	354.000.000	900.000	100%	25 Laporan	314.193.000	314.193.000	352.193.000	38.000.000	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan Surat Menyurat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Bulan	1 Laporan		3.100.000	4.000.000	900.000	12 Bulan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan		115.000.000	115.000.000	-	12 Bulan	12 Laporan	113.193.000	113.193.000	113.193.000	0	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya Kebutuhan Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan		235.000.000	235.000.000	-	12 Bulan	12 Laporan	198.000.000	198.000.000	235.000.000	37.000.000	

3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Baik	12 Bulan	134 Unit		531.000.000	685.578.000	104.578.000	12 Bulan	134 Unit		455.578.000	455.578.000	595.578.000	140.000.000
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		40.000.000	90.000.000	50.000.000	1 Unit	1 Unit		39.596.000	39.596.000	90.000.000	50.404.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	116 Unit		449.000.000	535.600.000	86.600.000	3 Unit	116 Unit		415.600.000	415.600.000	535.600.000	120.000.000
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	30 Unit		11.000.000	29.990.000	18.990.000	8 Unit	30 Unit		9.990.000	9.990.000	29.990.000	20.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		31.000.000	29.988.000	(1.012.000)	1 Unit	1 Unit		29.988.000	29.988.000	29.988.000	0
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	128,78 2%	128,78 1,57		6.150.000.000	5.113.312.025	(1.036.687.975)	128,78 2%	128,78 1,57		292.662.025	292.662.025	5.113.312.025	4.820.650.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	2%	2%		5.450.000.000	4.400.000.000	(1.050.000.000)	2%	2%		79.350.000	79.350.000	4.400.000.000	4.320.650.000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Benih Padi, Jagung, Kacang Hijau, Kacang Tanah, dan Benih Ubi Jalar yang dihibahkan Jumlah Bibit Durian, Duku, Jeruk, Pisang, Mangga, dan Nenas yang dihibahkan Jumlah Bibit Sayur-sayuran yang dihibahkan Jumlah bibit Tanaman Biofarmaka yang dihibahkan Jumlah Herbisida yang dihibahkan Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah Pengawasan terhadap Pengecer Pupuk dan Pestisida Jumlah Pupuk yang dihibahkan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	75 Ton 317170 Batang/Anak an 5 Ton 5 Ton 12 Ton 2 Dokumen 12 Bulan 150 Ton	1 Dokumen		5.450.000.000	4.400.000.000	(1.050.000.000)		1 Dokumen		79.350.000	79.350.000	4.400.000.000	4.320.650.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	2%	2%		700.000.000	713.312.025	13.312.025	2%	2%		213.312.025	213.312.025	713.312.025	500.000.000
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya bibit hortikultura hasil kultur jaringan berlabel Tersedianya Benih Padi Unggul bermutu untuk Penangkaran Laporan Hasil Pengembangan Perbenihan (Balai Benih Teluk Nilau) Lanjutan Pengembangan Kebun Pembibitan Pisang Pengembangan Balai Benih Induk Teluk Nilau	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1000 Bibit/Anakan 25 Ha 1 Laporan	1 VUB		700.000.000	713.312.025	13.312.025	1000 Benih Pisang 25 Ha 1 Laporan	1 VUB		213.312.025	213.312.025	713.312.025	500.000.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan (%)	63,18	63,18		11.600.000.000	6.050.000.000	(5.550.000.000)	63,18	63,18		4.546.781.780	4.546.781.780	6.050.000.000	1.503.218.220
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		Meningkatnya Indeks Pengembangan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peruntukan	2%	2%		6.000.000.000	175.000.000	(5.825.000.000)	2%	2%		717.596.300	717.596.300	175.000.000	(542.596.300)
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	Jumlah Pelatihan Penggunaan Alsintan Jumlah Pendampingan Penggunaan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dikelola	2 Kali 13 Kali	2 Kali 13 Kali		6.000.000.000	175.000.000	(5.825.000.000)	2 Kali 13 Kali	2 Kali 13 Kali		717.596.300	717.596.300	175.000.000	(542.596.300)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		Meningkatnya Indeks Pembangunan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peruntukan	41,18	41,18		5.600.000.000	5.875.000.000	275.000.000	41,18	41,18		3.829.185.480	3.829.185.480	5.875.000.000	2.045.814.520
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Sumber Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	1000 Meter	5 Unit		650.000.000	775.000.000	125.000.000	3 Unit	5 Unit		475.000.000	475.000.000	775.000.000	300.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8000 Meter	3 Unit		3.700.000.000	300.000.000	(3.400.000.000)	1 Unit	3 Unit		100.000.000	100.000.000	300.000.000	200.000.000

3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun/diperbaiki	J Jumlah Pintu Air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10 Unit	0 Unit		500.000.000		(500.000.000)		0 Unit					0
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP beserta Sarana Pendukungnya yang dibangun/diperbaiki	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 BPP	6 BPP		150.000.000	2.400.000.000	2.250.000.000	5 Unit	6 BPP		2.200.000.000	2.200.000.000	2.400.000.000	200.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sosialisasi Dana Alokasi Kegiatan Khusus fisik bidang pertanian tahun 2022	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3 Kali	3 Kali		600.000.000	2.400.000.000	1.800.000.000	3 Kali	3 Unit		1.054.185.480	1.054.185.480	2.400.000.000	1.345.814.520
				1 Dok.							1 Dok.					
				1 Kegiatan							1 Kegiatan					
				1 Unit							1 Unit					
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Fasilitas Pengendalian Bencana Pertanian	100%	100%		775.000.000	775.000.000	-	100%	100%		308.925.000	308.925.000	775.000.000	369.075.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%		775.000.000	775.000.000	-	100%	100%		308.925.000	308.925.000	775.000.000	369.075.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Serentak Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Jumlah Pembinaan dan Bimbingan Teknis tentang Penanggulangan Residu Pestisida sesuai Petuniuk Teknis	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	11 Kecamatan	1000 Ha		600.000.000	600.000.000	-	2 Kali	1000 Ha		230.925.000	230.925.000	600.000.000	369.075.000
				10 Kelompok Tani						424 Liter/Kg						
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Kali	1.500 Ha		175.000.000	175.000.000	-	2 Kali	1.500 Ha		78.000.000	78.000.000	175.000.000	0
				Jumlah Lahan Sawah yang Mendapatkan Subsidi AUTP						1.500 Ha						
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						200.000.000		(200.000.000)							
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000		(200.000.000)							
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dokumen Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian yang dikeluarkan		1 Dokumen			200.000.000		(200.000.000)	2 Kali						0
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Cakupan Bina Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura	25%	25%		4.400.000.000	2.146.755.000	(2.253.245.000)	25%	25%		1.705.312.912	1.705.312.912	2.146.755.000	441.442.088
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pertanian	100%	100%		4.400.000.000	2.146.755.000	(2.253.245.000)	100%	100%		1.705.312.912	1.705.312.912	2.146.755.000	441.442.088
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Kelembagaan Penyuluh di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	- 2 Desa	1 Unit		400.000.000	646.755.000	246.755.000	- 2 Desa	1 Unit		346.755.000	346.755.000	646.755.000	300.000.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan Honor PPL-THL, UKB, ATK, dan Perlengkapan BPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100%	13 Unit		4.000.000.000	1.500.000.000	(2.500.000.000)	100%	13 Unit		1.358.557.912	1.358.557.912	1.500.000.000	141.442.088